



LKIP 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Barat



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 telah diselesaikan tepat pada waktunya, walaupun dalam proses penyusunan masih terdapat hal-hal yang belum dianggap sempurna. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat menyusun LKIP tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan wajib pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2024 dapat direalisasikan dengan baik.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dicapai oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang karena adanya komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dalam mendukung visi dan misi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Disamping komitmen tersebut, peningkatan akuntabilitas dan kinerja operasional Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat juga didukung dengan motivasi yang tinggi dan kerja keras seluruh staf Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

Dengan keterbatasan data yang ada, kami menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan sehingga kami menganggap perlu adanya masukan-masukan serta saran-saran untuk mencapai kesempurnaan dalam pembuatan Laporan ini. Kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu menyelesaikan laporan ini, semoga Laporan ini dapat dipergunakan dan bermanfaat.

Bandung, Februari 2025

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN
RUANG PROVINSI JAWA BARAT

Ir. BAMBANG TIRTOYULIONO, M.M.
Pembina Utama Muda

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024 – 2026, yang selanjutnya diterjemahkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Penyusunan LKIP Tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang disusun secara sistematis dan melembaga sebagai hasil Capaian Kinerja Kegiatan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki, pengetahuan antisipatif, manajemen secara sistematis, efisien, efektif, responsif dan akuntabel, serta mampu mengukur hasil kinerjanya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis, sehingga dapat dicapai sasaran sesuai target capaian yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Tahun 2024-2026 dan RENJA Tahun 2024 SKPD Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu rencana strategis, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang prasarana jalan dan penataan ruang dengan wewenang menyelenggarakan penanganan jalan provinsi dan merumuskan serta mensinkronisasi penataan ruang di Jawa Barat, telah berusaha melaksanakan tugas-tugas dimaksud. Siklus kinerja dimulai dari perencanaan strategis, yang meliputi proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pada tahap selanjutnya dilaksanakan pengukuran kinerja, evaluasi dan analisa akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang dimuat dalam Penetapan Kinerja.

Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, ditetapkan metode pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran.

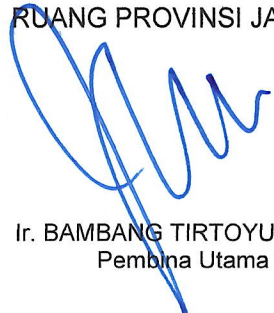
Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematis dan bertahap untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan. Pengukuran kinerja tahun 2024

dilaksanakan terhadap kinerja realisasi capaian penetapan kinerja tahun 2024. Pengukuran dilakukan terhadap indikator hasil (*outcome*).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 disusun dan merupakan gambaran Kinerja yang menyajikan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Bandung, Februari 2025

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN
RUANG PROVINSI JAWA BARAT



Ir. BAMBANG TIRTOYULIONO, M.M.
Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Dasar Hukum
1.4 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
1.5 Peta Proses Bisnis
1.6 Struktur Organisasi
1.7 Tugas Fokok dan Fungsi
1.8 Isu - Isu Strategis
1.9 Sumber Daya Manusia
1.10 Anggaran Tahun 2024
1.11 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip 2024
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Perencanaan
2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026
2.1.2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan
2.1.3 Indikator Kinerja Utama
2.1.4 Program dan Kegiatan
2.1.5 Rencana Kerja Tahun 2024
2.1.6 Perjanjian Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja DBMPR
3.1.1 Pengukuran Kinerja IKU
3.1.2 Analisa Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya
3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Renstra
2024 - 2026
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional
3.1.5 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran Strategik Beserta
Solusi
3.1.6 Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan
Pencapaian Perjanjian Kinerja
3.1.7 Analisis atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
3.2 Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
3.2.1. Foto Dokumentasi Kegiatan
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG



Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah

melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya di bidang kebinamargaan dengan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebinamargaan, berdasarkan azas ekonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Prasarana jalan adalah kebutuhan mutlak dalam system angkutan jalan raya. Kinerja sistem transportasi jalan raya akan bergantung pada seberapa besar daya dukung prasarana jalan yang mampu disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran pokok dalam suatu sistem transportasi. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang prasarana jalan dan jembatan dengan wewenang menyelenggarakan jalan dan jembatan Provinsi di Jawa Barat, diharapkan mampu memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki, pengetahuan antisipatif, manajemen secara sistematis, efisien, efektif, responsif dan akuntabel, agar menghasilkan sistem jalan Provinsi yang mantap dan terpadu sebagai upaya dalam melaksanakan tugas serta mampu mengukur hasil kinerjanya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis, untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja. Sehingga kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dapat terpelihara dengan baik.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKIP Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah untuk menyampaikan capaian kinerja indikator sasaran yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2024.

Tujuan penyusunan LKIP Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pencapaian kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2024.

LKIP Dinas Bina Marga dan Penataan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Bina Marga dan Penataan Provinsi Jawa Barat dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, LKIP Dinas Bina Marga dan Penataan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong pelaksanaan Tata Ruang Wilayah, Pembangunan Jalan dan Jembatan, secara baik dan benar berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui masukan dan umpan balik dari seluruh stakeholders;
3. Memelihara kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

1.3 DASAR HUKUM

Adapun ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKIP Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

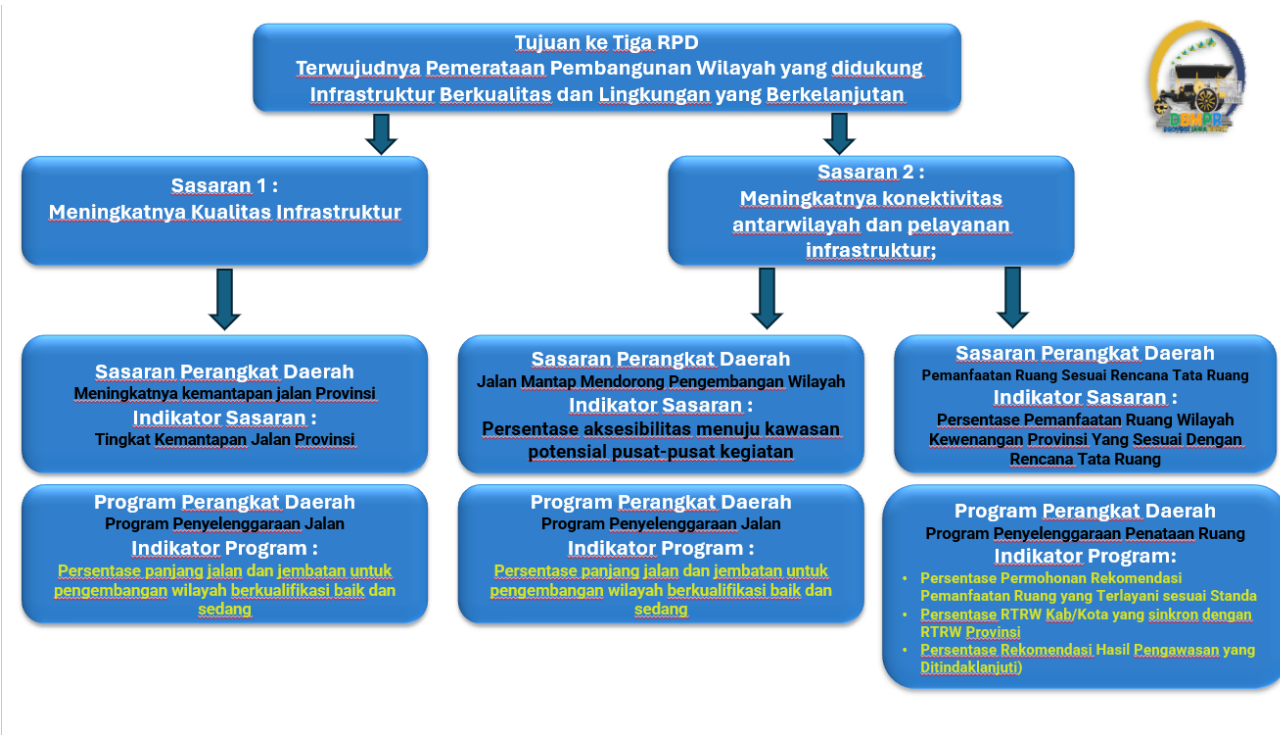
1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi
2. Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581).

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.4 CASCADING KINERJA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa

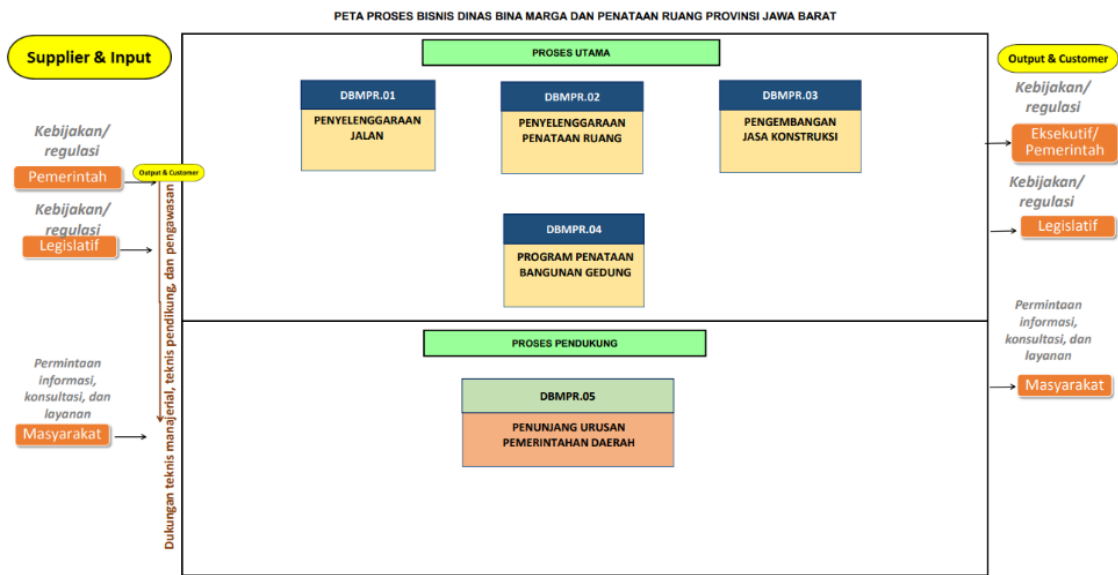
Barat Tahun 2024-2026;. Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :



GAMBAR 1.1 CASCADING KINERJA

1.5 PETA PROSES BISNIS

Peta Proses bisnis pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Berikut ini merupakan Peta Proses Bisnis pada Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat :



GAMBAR 1.2 PETA PROSES BISNIS

1.6 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Amanah dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa barat. Berikut ini merupakan susunan organisasi dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat:



GAMBAR 1.3 STRUKTUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

1.7 TUGAS FOKOK DAN FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, DBMPR Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, meliputi sub urusan jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan pengelolaan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, adalah :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang-Bidang.

Sekretariat membawahkan :

- Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- Kelompok JF (Arsiparis) dan Pelaksana Keuangan, Ketata Usahaan dan Barang/Aset

c. Bidang Teknik Jalan

Bidang Teknik Jalan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang aspek teknik jalan, meliputi regulasi dan kerjasama, sistem jaringan dan leger jalan serta rekayasa teknik.

Bidang Teknik Jalan membawahkan :

- Kelompok JF dan Pelaksana Bidang;

d. Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan

Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang aspek pemeliharaan dan pembangunan jalan, meliputi pemeliharaan, pembangunan serta pengawasan dan pemanfaatan.

Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan membawahkan :

- Kelompo JF dan Pelaksana Bidang;

e. Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan jasa konstruksi, meliputi pengaturan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi serta pengawasan, data dan informasi.

Bidang Jasa Konstruksi membawahkan :

- Kelompok JF dan Pelaksana Bidang;

f. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang, meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bidang Penataan Ruang membawahkan :

- Kelompok JF dan Pelaksana Bidang;

Di samping itu terdapat juga Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang.

Tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang teknis operasional pelayanan pengelolaan jalan. Sedangkan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu :

- a. penyusunan petunjuk teknis pelayanan pengelolaan jalan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan pengelolaan jalan.

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu:

- a. Kepala UPTD;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Pelaksana Ke TU an;
- d. Kelompok JF dan Pelaksana;

Tugas pokok UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi yaitu melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengujian mutu konstruksi. Sedangkan fungsi UPTD Pengujian Konstruksi yaitu :

- a. Penyelenggaraan pelayanan di bidang konstruksi, meliputi pelayanan jasa pengujian mutu tanah, bangunan, dan jalan dan jembatan; dan
- b. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan, meliputi umum, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian.

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok JF dan Pelaksana;
- d. Kelompok Jabatan Pelaksana ke TU an;

Mengacu kepada kerangka diatas, dalam upaya mewujudkan visi dan misi terkait khusus urusan Pekerjaan Umum , serta berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat memfokuskan kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu:

- a. Tingkat konektivitas Antar Wilayah, dengan pembangunan dan revitalisasi jalan provinsi dengan tingkat kemantapan jalan dan konektivitas yang tinggi, melalui pembangunan/perbaikan jalan provinsi
- b. Indeks kualitas lingkungan hidup, melalui meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat

1.8 ISU - ISU STRATEGIS

Untuk dapat menunjang keberlangsungan dan kemajuan sektor insfrastruktur di Provinsi Jawa Barat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dapat terus meningkatkan infrastruktur yang terintegrasi dengan baik nyaman dan aman. Selain itu, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat juga dapat terus meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja dengan menggunakan teknologi terbaru dan sistem manajemen yang efektif serta mengembangkan penataan ruang yang terpadu dan terintegrasi dengan baik.

Isu-isu strategis pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, dengan memperhatikan bahwa isu tersebut :

- a) Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Provinsi
- b) Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD
- c) Berdampak besar pada publik
- d) Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah
- e) Kemudahan untuk menangani, dan
- f) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Kegiatan Strategis DBMPR Tahun 2024

NO	PROGRAM STRATEGIS	TARGET	PAGU ANGGARAN
1	2	3	5
1	Rekonstruksi Jalan Parung Panjang - Bunar	1,085 Km	Rp 12.609.224.047,00
2	Rekonstruksi Jalan Cileungsi - Cibinong (Citeureup), Jl. Mayor Oking (Cibinong)	5,197 Km	Rp 21.278.358.853,00
3	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Jampang Tengah - Kiaradua	11,57 Km	Rp 40.365.355.039,00
4	Rekonstruksi Ruas Jalan Cipeundeuy - Cikalongwetan	2,615 Km	Rp 14.067.506.994,00
5	Rekonstruksi Ruas Jalan Rajamandala - Cipeundeuy	3,385 Km	Rp 19.422.838.344,00
6	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Wado (Sp. Kirisik) - Bts.Sumedang/Majalengka (Kirisik)	5,000 Km	Rp 10.463.562.733,00
7	Pembangunan Jembatan Sodongkopo (Lanjutan)	140,00 M	Rp 50.888.627.000,00
8	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Jangga - Cikamurang	8,472 Km	Rp 18.290.123.289,00
9	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Kadipaten - Bts. Majalengka / Indramayu	3,000 Km	Rp 15.254.664.997,00



1.9 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat memiliki sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana kerja. Gambaran umum potensi sumber daya manusia dapat digambarkan berdasarkan komposisi pembagian berdasarkan pendidikan.



1.10 ANGGARAN TAHUN 2024

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2024 memiliki anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.072.906.213.842 Dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp.96.652.214.854, belanja barang dan jasa sebesar Rp.341.560.650.982 dan belanja modal sebesar Rp.634.693.348.006.



1.11 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP 2024

Berikut ini merupakan tindaklanjut saran / rekomendasi berdasarkan Surat Inpektorat Provinsi Jawa Barat Nomor 232/PW.02.02/Irban I Tanggal 12 September 2024 tentang Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 atas SAKIP Tahun 2023:

NO	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Mempublikasikan dokumen Perencanaan Kinerja tepat waktu;	Publikasi dokumen Perencanaan Kinerja pada <i>website</i> Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat secara tepat waktu
2.	Memperbaiki kualitas rumusan hasil (tujuan/ sasaran) yang menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai;	1. Review dan Analisis Dokumen Kinerja Sebelumnya 2. Evaluasi dan Revisi Tujuan/Sasaran yang Ada
4.	Mengoptimalkan penggunaan informasi dalam Laporan Kinerja agar sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;	Analisis Data Laporan Kinerja dan Penyusunan Rencana Penyesuaian Anggaran
5.	Melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada seluruh unit kerja secara berjenjang sampai kepada semua pegawai;	Melibatkan seluruh bidang dan pegawai untuk memantau capaian kinerja secara berkala. Baik capaian kinerja sub kegiatan, kegiatan maupun program yang dikaitkan dengan capaian strategisnya
6.	Melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada unit kerja (UPTD) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat	Melaksanakan Rapat Pimpinan secara berkala untuk memantau Capaian Kinerja setiap unsur pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN

Pembangunan berkelanjutan dan mengandung pengertian komprehensif, tentunya menuntut dalam hal perencanaan, program dan kegiatan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat. Oleh karena itu Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan jalan dan jembatan yang dimanifestasikan dalam Rencana Strategis BMPR Provinsi Jawa Barat.

2.1.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 – 2026

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program yang dilaksanakan, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat harus terus menerus melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang lebih baik. Untuk itu Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat perlu membuat suatu perencanaan yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat). Rencana Strategis ini merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan

2.1.2 TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan suatu strategi. Strategi dijabarkan dalam kebijaksanaan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tertentu untuk mempertajam makna dari strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan yang mendukung strategi. Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Kegiatan adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program.

Dari penjabaran diatas, berikut ini adalah strategi yang telah ditetapkan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat:

1. Penataan ruang yang adil dan merata melalui pengembangan dan Pembangunan pusat kegiatan baru pada wilayah terisolir,
2. Peningkatan konektivitas dan Aksesibilitas di wilayah Utara dan Selatan Jawa Barat,
3. Percepatan pengembangan dan pembangunan infrastruktur di Kawasan Rebana dan Kawasan Jabar Selatan,
4. Peningkatan konektivitas antar wilayah terutama untuk mendorong fungsi PKN, PKW, PKL, kawasan strategis provinsi di Jawa Barat.
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang
6. RTRW Kab/Kota sesuai dengan RTRW Provinsi
7. Terkendalinya Pemanfaatan Ruang
8. Tersedianya dokumen perencanaan teknis yang siap bangun
9. Terlaksananya pengawasan teknis pelaksanaan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jalan
10. Bertambahnya Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang, dengan melakukan rekonstruksi jalan, pemeliharaan berkala, dan juga pemeliharaan rutin pada jalan dan jembatan provinsi
11. Meningkatkan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli
12. Meningkatkan penyelenggaraan Sistem formasi jasa Konstruksi
13. Meningkatkan Kebijakan khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
14. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perkantoran, kepegawaian dan keuangan administrasi pelayanan
15. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah

2.1.3 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, antara lain:

Tujuan RPD ke-3 : Terwujudnya Pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan

Tujuan RPD ke-3 : Terwujudnya Pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan

No.	Tujuan		Sasaran		Strategis		Arah Kebijakan
1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur	1	Jalan Mantap Mendorong Pengembangan Wilayah	1	Peningkatan konektivitas dan Aksesibilitas di wilayah Utara dan Selatan Jawa Barat	1	Pembangunan dan revitalisasi jalan provinsi di seluruh wilayah kewenangan dan diperbatasan antar provinsi maupun antar kabupaten/kota;
						2	Jaringan jalan penghubung sistem transportasi intermoda dan antarmoda (bandara, darmaga, stasiun dll) perlu diprioritaskan penanganan jalannya sehingga fungsi pergerakan antar moda dan intermoda dapat berjalan dengan baik.
						3	Akselerasi pembangunan jalan tol dengan koordinasi multi pemangku kepentingan
				2	Percepatan Pembangunan infrastruktur di Kawasan Rebana dan Kawasan Jabar Selatan	4	Jaringan jalan penghubung pada kawasan potensi ekonomi melalui Pembangunan/Peningkatan jalan baik horizontal maupun vertikal di provinsi Jawa Barat bagian Selatan, dan Infrastruktur yang menghubungkan pusat ekonomi di wilayah
				3	Peningkatan konektivitas antar wilayah terutama untuk mendorong fungsi PKN,	5	Menyelesaikan Penyusunan data leger jalan Provinsi sebagai data pendukung pengambilan keputusan untuk rencana penanganan jalan, dimana baru tersusun sekitar 700 Km dari total

No.	Tujuan		Sasaran		Strategis		Arah Kebijakan
					PKW, PKL, Kawasan strategis provinsi di Jawa Barat		jalan provinsi 2.362,183 Km. Ditargetkan setiap tahun menyusun 400 Km sehingga akan selesai pada tahun 2027.
						6	Penguatan identifikasi konektivitas antar status jalan di Jawa Barat terutama yang menghubungkan Jaringan jalan yang mendorong fungsi PKN, PKW, PKL, Kawasan strategis provinsi untuk pengembangan wilayah perlu diprioritaskan penanganan jalannya sehingga fungsi pusat kegiatan tersebut dapat mendorong perkembangan di wilayah hinterland nya.
		2	Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	1	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang (Pergub Insentif Disinsentif ditargetkan tersedia di tahun 2023; Pergub Sanksi Administratif ditargetkan tersedia di tahun 2024)
						2	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Government goes to campus, MBKM, Bimtek/Pelatihan)

No.	Tujuan		Sasaran		Strategis		Arah Kebijakan
						3	Melakukan pengembangan sistem informasi penataan ruang (Wargi Jabar)
				2	RTRW Kab/Kota sesuai dengan RTRW Provinsi	4	Peningkatan akurasi rencana teknis sesuai kebutuhan spesifikasi jalan dan jembatan
				3	Terkendalnya Pemanfaatan Ruang	5	Melakukan analisis kesesuaian ruang untuk KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
						6	Melakukan penyusunan dokumen SPPR (Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang)
						7	Melakukan Pemantauan PKW dan KSP
2	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	1	Meningkatnya kemantapan jalan provinsi	1	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan/ Preserv asi Jalan	1	Peningkatan akurasi rencana teknis sesuai kebutuhan spesifikasi jalan dan jembatan
				2	Meningkatnya Kepatuhan Penyedia Jasa Terhadap Ketentuan Dokumen Rencana Teknis	2	Pengembangan dan peningkatan infrastruktur melalui KPBU dan sumber pendanaan lainnya
						3	peningkatan efektifitas pengawasan konstruksjalan dan jembatan sesuai rencana teknis
				3	Struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan	4	peningkatan ketersediaan peralatan pendukung penanganan jalan dan jembatan
						5	Peningkatan akurasi survey kondisi jalan dan

No.	Tujuan		Sasaran		Strategis		Arah Kebijakan
					Provinsi di Jawa Barat memenuhi standar teknis jalan		jembatan
						6	Penguatan supervisi kualitas bahan konstruksi penanganan jalan
						7	peningkatan efektifitas dan kualitas konstruksjalan dan jembatan sesuai rencana teknis
				4	Material Jalan Memiliki Jaminan Mutu	8	Meningkatnya Pelayanan Uji Kualitas Jalan
				5	Meningkatnya peran masyarakat konstruksi Jawa Barat dalam Pembangunan infrastruktur	9	Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Ahli Konstruksi
						10	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
						11	Meningkatnya Penyelenggaraan Jasa konstruksi
				6	Meningkatnya kualitas tata kelola Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	Meningkatkan kualitas pelayanan Masyarakat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat
						13	Pengelolaan system informasi terkait pengelolaan jalan, tata ruang dan jasa konstruksi di Jawa Barat

No.	Tujuan		Sasaran		Strategis		Arah Kebijakan
						14	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat



2.1.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pada Renstra Perubahan 2024 – 2026, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Persentase Persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial pusat-pusat kegiatan.
2. Persentase tingkat kemantapan jalan
3. Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Kewenangan Provinsi Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang

2.1.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Guna mendukung kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ditunjang dengan 4 Program, 16 Kegiatan dan 144 Sub Kegiatan dengan proporsi anggaran :

1. Program Penyelenggaraan Jalan
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - i. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
 - j. Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 - k. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi
4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - l. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penataan Ruang
 - m. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
 - n. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
 - o. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi



2.1.6 RENCANA KERJA TAHUN 2024

Perencanaan Kinerja Tahun 2024 Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat sebagai upaya pelaksanaan TUPOKSI dan kebijakan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026 pada tujuan RPD ke-3, yaitu “Terwujudnya Pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan”.

Berdasarkan isu strategis Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dan keterkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, pada tabel di bawah terdapat sasaran dan indikator kinerja disertai dengan target tahun 2024, yaitu Persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial pusat-pusat kegiatan, Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi, Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Kewenangan Provinsi Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang.

1. Program Penyelenggaraan Jalan

- 1) Outcome yang akan dicapai pada Bidang Teknik Jalan dalam mendukung peningkatan kemantapan jalan Provinsi yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan/Indikatornya adalah Persentase jalan terbangun atausesuai dokumen perencanaan teknis, Kegiatannya adalah Jalan Provinsi dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;
 - b. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan.
- 2) Outcome yang akan dicapai pada Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan mendukung peningkatan kemantapan jalan Provinsi yaitu Meningkatnya Kepatuhan Penyedia Jasa Terhadap Ketentuan Dokumen Rencana Teknis. Indikatornya adalah Persentase penyedia jasa yang patuh terhadap ketentuan dokumen rencana teknis, Kegiatannya adalah Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan sub kegiatan adalah Survey Kondisi Jalan/Jembatan.
- 3) Outcome yang akan dicapai pada UPTD Pengelolaan Jalan dan jembatan Wilayah Pelayanan I – VI mendukung peningkatan kemantapan jalan Provinsi yaitu Struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan Provinsi di Jawa Barat memenuhi standar teknis jalan. Indikatornya adalah Persentase Panjang jalan dan jembatan terqualifikasi baik dan sedang, Kegiatannya adalah Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Rekonstruksi Jalan
 - b. Rehabilitasi Jalan
 - c. Pemeliharaan Berkala Jalan

- d. Pemeliharaan Rutin Jalan
 - e. Penggantian Jembatan
 - f. Rehabilitasi Jembatan
- 4) Outcome yang akan dicapai pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dalam mendukung peningkatan kemantapan jalan Provinsi yaitu Material Jalan Memiliki Jaminan Mutu. Indikatornya adalah Persentase Jalan Terbangun yang Menggunakan Material Lulus Uji Pembanding, Kegiatannya adalah Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan sub kegiatan adalah Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan.
- 5) Outcome yang akan dicapai pada Bidang Teknik Jalan dalam mendukung aksesibilitas menuju kawasan potensial pusat-pusat kegiatan yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan/Preservasi Jalan untuk Pengembangan Wilayah yaitu dengan keterhubungan pada kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan. Indikatornya adalah Persentase Jalan Terbangun atau Terpreservasi yang Sesuai Dokumen Perencanaan Teknis untuk Pengembangan Wilayah. Kegiatannya adalah Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan sub kegiatan adalah Pengelolaan Leger Jalan.
- 6) Outcome yang akan dicapai pada Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam mendukung aksesibilitas menuju Kawasan potensial pusat-pusat kegiatan yaitu Rekomendasi Hasil Penyusunan Kondisi Jalan Diterapkan dalam Dokumen Perencanaan untuk Pengembangan Wilayah. Indikatornya adalah Persentase Rekomendasi Hasil Survey Kondisi Jalan yang Ditindaklanjuti dalam Dokumen Perencanaan untuk Pengembangan Wilayah, Kegiatannya adalah Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan sub kegiatan adalah Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan.
- 7) Outcome yang akan dicapai pada UPTD Pengelolaan Jalan dan jembatan Wilayah Pelayanan I – VI dalam mendukung aksesibilitas menuju Kawasan potensial pusat-pusat kegiatan yaitu Struktur dan Kapasitas Jalan dan Jembatan pada Ruas-Ruas Jalan Provinsi untuk Pengembangan Wilayah di Jawa Barat Memenuhi Standar Teknis Jalan. Indikatornya adalah Persentase Panjang Jalan dan Jembatan untuk Pengembangan Wilayah Berkualifikasi Baik dan Sedang, Kegiatannya adalah Penyelenggaraan jalan Provinsi dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Rekonstruksi Jalan
 - b. Pemeliharaan Berkala Jalanc.
 - c. Penggantian Jembatan
 - d. Pembangunan Jembatan

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome yang akan dicapai yaitu Meningkatnya kemampuan struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan Provinsi di Jawa Barat pekerjaan. Indikatornya sebagai berikut :

- a. Persentase Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Lahan pada RUMIJA yang diterbitkan. Kegiatannya yaitu Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan indikator kegiatannya adalah Jumlah Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Lahan pada RUMIJA. Sub Kegiatannya adalah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.
- b. Persentase Peralatan Kebinamargaan yang tersedia. Kegiatannya yaitu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kegiatannya adalah Jumlah peralatan pendukung pemeliharaan jalan. Sub Kegiatannya adalah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Selain program urusan wajib sub bidang jalan, sub bidang jasa konstruksi, dan sub bidang penataan ruang, terdapat juga program-program pendukung yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**.

- 1) Outcome yang akan dicapai yaitu Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah BMPR. Indikatornya adalah Persentase dokumen pengadaan barang dan jasa yang berspesifikasi Produk Dalam Negeri (PDN).
- 2) Outcome yang akan dicapai yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Indikatornya adalah sebagai berikut :
 - Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik. Kegiatannya adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi. Kegiatannya adalah Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatannya adalah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
- d. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- e. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi. Kegiatannya adalah Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu :
 - a. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
 - b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- Nilai Indeks Profesionalitas ASN PD. Kegiatannya adalah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.
- Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi. Kegiatannya adalah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- Persentase Barang Milik Daerah yang tertib Administrasi. Kegiatannya adalah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu :
 - a. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
- Nilai SAKIP PD. Kegiatannya adalah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu :
 - a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik. Kegiatannya adalah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan yaitu :
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan;
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

3. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Outcome yang akan dicapai yaitu Meningkatnya Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Jawa Barat dalam Pembangunan Infrastruktur. Indikatornya adalah Tingkat Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi Jawa Barat dalam Pembangunan Infrastruktur dengan Kegiatannya sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi. Indikator kegiatannya adalah Persentase Tenaga Ahli Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan dengan sub kegiatannya sebagai berikut :
 - a. Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli;
 - b. Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli;
 - c. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli;
 - d. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli.
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi. Indikator kegiatannya yaitu Persentase layanan jasa konstruksi yang memanfaatkan sistem informasi dengan sub kegiatannya sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI;
 - b. Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi;
 - c. Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi.
- Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Indikator kegiatannya yaitu persentase sektor konstruksi yang terbina dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi;
 - b. Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi

4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Outcome yang akan dicapai yaitu Terwujudnya tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing. Indikatornya adalah:

- a. Persentase RTRW Kab/Kota yang sinkron dengan RTRW Provinsi. Kegiatannya adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang dengan sub kegiatan yaitu Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW Kab/Kota.
- b. Persentase Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang Terlayani sesuai Standar. Terdapat 2 kegiatan, yang pertama adalah Meningkatnya

Ketersediaan Pengaturan Penataan Ruang dengan sub kegiatannya yaitu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang serta Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang. Kemudian untuk kegiatan yang kedua adalah Pelayanan Permohonan Informasi Pemanfaatan Ruang Tepat Waktu dengan sub kegiatannya Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang, Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, dan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;

- c. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti. Kegiatannya adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi dengan sub kegiatan yaitu Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Nonfiskal serta Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.

2.1.7 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2024



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. BAMBANG TIRTOYULIONO, M.M.
Jabatan : KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA BARAT

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : BEY TRIADI MACHMUDIN, S.E., M.T.
Jabatan : PENJABAT GUBERNUR JAWA BARAT

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 9 Juli 2024

PIHAK KEDUA
Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS BINA MARGA DAN
PENATAAN RUANG


Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

BEY TRIADI MACHMUDIN,


Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN
RUANG PROVINSI JAWA BARAT,

Ir. BAMBANG TIRTOYULIONO, MM.
Pembina Utama Madya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut: <https://ndesibar.jatengprov.go.id/v/ECAE10B4ED>

ECAE10B4ED

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Jalan Mantap Mendorong Pengembangan Wilayah	Persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial pusat-pusat kegiatan	28,54%
2.	Meningkatnya kemantapan jalan Provinsi	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	86,72%
3.	Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Kewenangan Provinsi Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	59,80%

No.	Program	Anggaran Rp.	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	154.192.211.069	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Jalan	920.765.750.114	APBD
3.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	3.000.000.000	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	5.725.000.000	APBD

Bandung, 9 Juli 2024

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN
PENATAAN RUANG

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

BEY TRIADI MACHMUDIN,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN
RUANG PROVINSI JAWA BARAT,

Ir. BAMBANG TIRTOYULIONO, MM.
Pembina Utama Madya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://videbar.jabarprov.go.id/vtECAE10B4ED>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA DBMPR PROVINSI JAWA BARAT

Sasaran dari program infrastruktur jalan yaitu tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa dengan indikator sasaran yaitu tingkat kemantapan jalan.

Sasaran strategis Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang yaitu meningkatkan kondisi jalan dan jembatan pada ruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktifitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan maka indikator kinerjanya adalah tingkat kemantapan jalan. Pengertian jalan mantap adalah panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang, sedangkan jalan dengan kondisi tidak mantap ruas jalan yang kenyataan sehari-hari masih berfungsi melayani lalu lintas dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu (1) data internal berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi, dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat efisiensi dan efektifitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi data, yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewajibkan menyampaikan laporan data kinerja secara reguler, mingguan, bulanan, triwulanan, dan seterusnya.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak akan diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah hal ini terkait pada

pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dimaksudkan dalam laporan kinerja ini, adalah untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2018 - 2023, guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategik tersebut. Dalam kerangka pengukuran kinerja ini terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Adapun mengenai rumus yang digunakan untuk pengukuran kinerja ini adalah sebagai berikut:

Rumus 1:

Persentase Pencapaian Rencana	=	$\frac{\text{Realisasi Tahun } t}{\text{Target Rencana Tahun } t}$	x 100%
-------------------------------	---	--	--------

Rumus 2:

Persentase Peningkatan/Penurunan capaian Kinerja	=	$\frac{\text{Realisasi Thn } t - \text{Realisasi Thn } t-1}{\text{Realisasi Tahun } t-1}$	X 100%
--	---	---	--------

Rumus 3:

Persentase Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya	=	$\frac{\text{Realisasi Thn } t}{\text{Realisasi Tahun } t-1}$	x 100%
---	---	---	--------

Rumus 4:

Persentase Perbandingan dengan Target Jangka Menengah	=	$\frac{\text{Realisasi Thn Awal Renstra sd Thn } t}{\text{Target Akhir Renstra Tahun } n}$	x 100%
---	---	--	--------

3.1.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

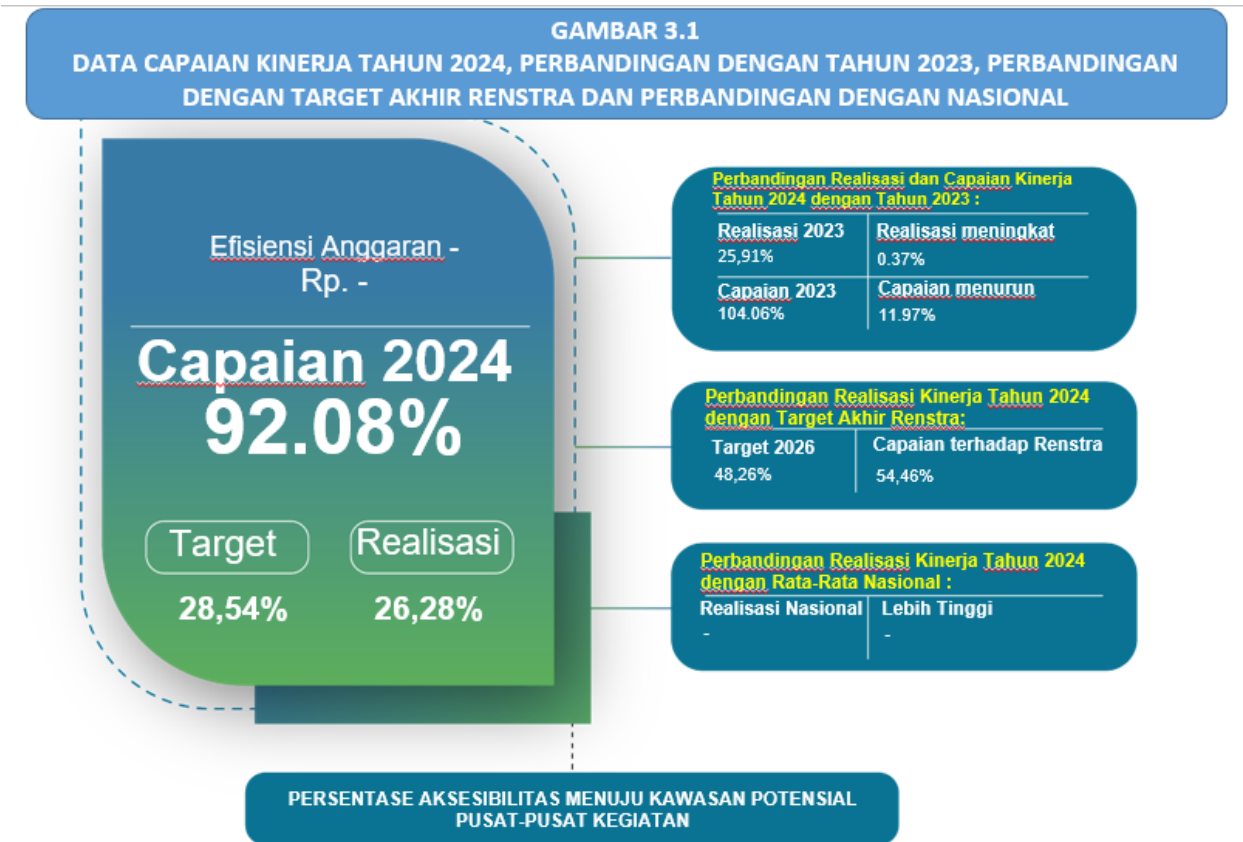
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat dan akuntabel yang berguna bagi pengambil keputusan dalam rangka perbaikan kinerja. Pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan dapat dilihat berdasarkan persentase tingkat capaian, yang menunjukkan sasaran kegiatan yang ingin dicapai pada tahun 2023 sesuai dengan rencana tingkat capaian (target) yang terukur dari persentase tingkat capaian.

Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat yaitu:

- 1. Persentase Aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial Pusat-Pusat Kegiatan
- 2. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi
- 3. Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Kewenangan Provinsi Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang

A. AKSESIBILITAS MENUJU KAWASAN POTENSIAL PUSAT-PUSAT KEGIATAN YANG DIBANGUN/ DITINGKATKAN

Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat pertama yaitu aksesibilitas menuju kawasan potensial pusat-pusat kegiatan, sebagaimana gambar 3.1.



Aksesibilitas menuju kawasan potensial pusat-pusat kegiatan capaian pada Tahun 2024 tidak mencapai target yang direncanakan, yaitu sebesar 92,08% yaitu dari target sebesar 28,54% dan terealisasi sebesar 26,28%. Aksesibilitas menuju

kawasan potensial pusat-pusat kegiatan tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan oleh bencana alam yang terjadi di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, yang mengakibatkan kerusakan pada sejumlah ruas jalan strategis yang berfungsi sebagai akses utama menuju kawasan-kawasan tersebut. Sehingga aksesibilitas yang mendukung pusat layanan masyarakat serta menuju kawasan potensial di wilayah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi menjadi terganggu karena adanya kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di ruas jalan provinsi.

Dari aspek realisasi, aksesibilitas menuju kawasan potensial pusat-pusat kegiatan mengalami penurunan sebesar 11,97% yaitu dari capaian tahun 2023 sebesar 104,06% menjadi 92,08% pada tahun 2024. Sedangkan dari aspek capaian, aksesibilitas menuju kawasan potensial pusat-pusat kegiatan mengalami penurunan 11,97% dari capaian tahun 2023 sebesar 104,06% menjadi 92,08% pada tahun 2024.

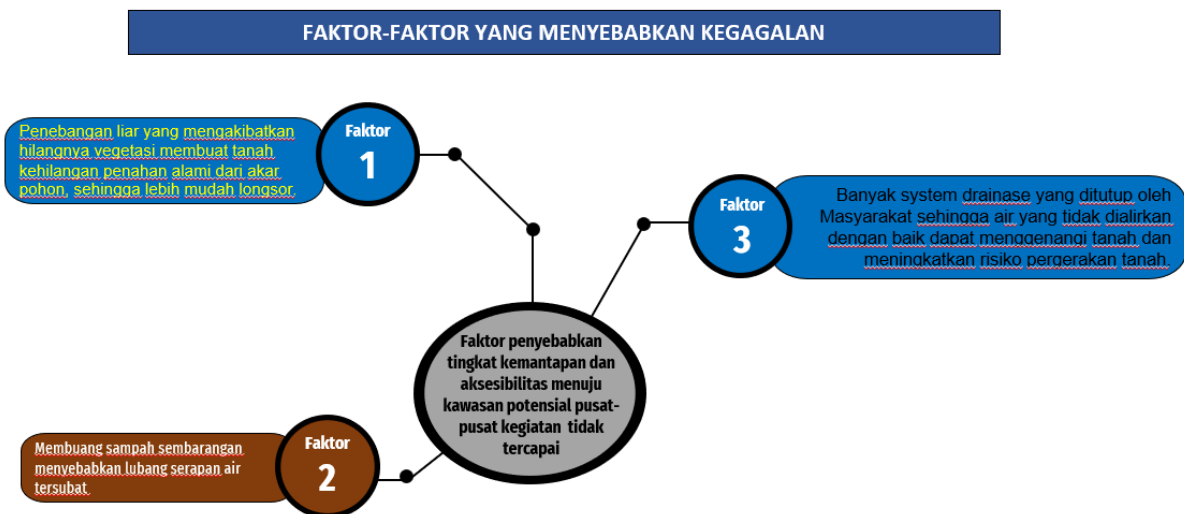
Dilihat dari prespektif perencanaan jangka menengah atau Renstra Dinas BMPR Tahun 2026, aksesibilitas menuju kawasan potensial pusat-pusat kegiatan masih memerlukan akselerasi pencapaian target akhir renstra dengan capaian kinerja sebesar 54,46% yaitu dari target 48,26% terealisasi sebesar 26,28%.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional, aksesibilitas menuju kawasan potensial pusat-pusat kegiatan tidak dapat dibandingkan karena hanya Provinsi Jawa Barat yang memakai indikator tersebut.

Adapun faktor yang mengakibatkan aksesibilitas menuju kawasan potensial pusat-pusat kegiatan tidak tercapai yaitu

1. Penebangan liar yang mengakibatkan hilangnya vegetasi membuat tanah kehilangan penahan alami dari akar pohon, sehingga lebih mudah longsor.
2. Membuang sampah sembarangan menyebabkan lubang serapan air tersubut,
3. Banyak system drainase yang ditutup oleh Masyarakat sehingga air yang tidak dialirkan dengan baik dapat menggenangi tanah dan meningkatkan risiko pergerakan tanah.

Ketiga hal tersebut diatas berdampak terjadinya bencana alam yang terjadi di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, yang mengakibatkan kerusakan pada sejumlah ruas jalan provinsi.



Adapun upaya perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2025 yaitu Kolaborasi dengan Dinas Kehutanan dalam rangka reboisasi dan konservasi hutan di sekitar jalan untuk mengurangi resiko longsor serta banjir, kolaborasi dengan aparat hukum dalam pengurangan aktivitas yang merusak lingkungan dan penambahan alat berat untuk penanggulangan akibat bencana alam.

Program yang mendukung pencapaian aksesibilitas menuju kawasan potensial pusat-pusat kegiatan yaitu program Penyelenggaraan Jalan. Adapun efisiensi Aksesibilitas menuju kawasan potensial pusat-pusat kegiatan tidak ada karena tidak mencapai target.

B. TINGKAT KEMANTAPAN JALAN PROVINSI

Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat kedua yaitu tingkat kemantapan jalan provinsi, sebagaimana gambar 3.2.



Jawa Barat terkoneksi jalan mantap. Capaian kinerja tingkat kemantapan jalan provinsi pada Tahun 2024 sebesar 86,72% yaitu dari target sebesar 86,72% dan terealisasi 86.44%. Tingkat Kemantapan Jalan tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan oleh bencana alam yang terjadi di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, yang mengakibatkan kerusakan pada sejumlah ruas jalan strategis yang berfungsi sebagai akses utama menuju kawasan-kawasan tersebut . Realisasi 86.44% berarti bahwa terdapat beberapa ruas jalan provinsi tidak dalam kondisi tidak mantap yang disebabkan karena ada kejadian bencana alam. Ruas jalan yang terdampak yaitu Ruas Jalan Sukanagara – Sindangbarang sepanjang 1.2 km, Ruas Jalajn Bts.Kab.Bandung/Cianjur - Kebon Muncang – Cikadu sepanjang 0.2km, Ruas Jalan Sukabumi (Baros) – Sagaranten sepanjang 4.2 km, Sagaranten – Tegalbuleud sepanjang 0.2 km, Jampang Tengah – Kiara Dua sepanjang 1.00 km, SP.Karanghawu – Cikotok sepanjang 0.4 km dan Ruang Jalan Loji – Puncak Darma sepanjang 0.40 km. Meski demikian, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat bersama pihak terkait telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk penanganan darurat untuk memperbaiki kerusakan jalan, memulihkan aksesibilitas, dan memastikan jaringan jalan tetap dapat digunakan.

Dari aspek capaian kinerja, tingkat kemantapan jalan provinsi mengalami penurunan sebesar 0,39% yaitu dari capaian tahun 2023 sebesar 100,07% menjadi 99,68% pada tahun 2024. Dilihat dari perbandingan realisasi, tingkat kemantapan jalan provinsi mengalami peningkatan 3.03% dari realisasi tahun 2023 sebesar 83.84% menjadi 86,44% pada tahun 2024.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah atau Renstra Dinas BMPR Tahun 2023, tingkat kemantapan jalan masih memerlukan akselerasi pencaiaian target akhir renstra dengan capaian 93,85% yaitu dari target 92,10% terealisasi sebesar 86,44%.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional, tingkat kemantapan jalan provinsi tidak dapat dibandingkan karena provinsi jawa barat yang memakai indikator tersebut.



Adapun faktor yang mengakibatkan tingkat kemantapan jalan provinsi tidak tercapai yaitu

1. Penebangan liar yang mengakibatkan hilangnya vegetasi membuat tanah kehilangan penahan alami dari akar pohon, sehingga lebih mudah longsor.
2. Membuang sampah sembarangan menyebabkan lubang serapan air tersubut,
3. Banyak system drainase yang ditutup oleh Masyarakat sehingga air yang tidak dialirkan dengan baik dapat menggenangi tanah dan meningkatkan risiko pergerakan tanah.

Ketiga hal tersebut diatas berdampak terjadinya bencana alam yang terjadi di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, yang mengakibatkan kerusakan pada sejumlah ruas jalan provinsi.

Meski demikian, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat bersama pihak terkait telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk penanganan darurat untuk memperbaiki kerusakan jalan, memulihkan aksesibilitas, dan memastikan jaringan jalan tetap dapat digunakan.



Adapun upaya perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2025 yaitu Kolaborasi dengan Dinas Kehutanan dalam rangka reboisasi dan konservasi hutan di sekitar jalan untuk mengurangi resiko longsor serta banjir, kolaborasi dengan aparat hukum dalam pengurangan aktivitas yang merusak lingkungan dan penambahan alat berat untuk penanggulangan akibat bencana alam.



Program yang mendukung pencapaian tingkat kemantapan jalan provinsi yaitu program penyelenggaraan jalan. Adapun efisiensi Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi tidak ada karena tidak mencapai target.

C. PERSENTASE PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KEWENANGAN PROVINSI YANG SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG

Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat ketiga yaitu Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Kewenangan Provinsi yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang, sebagaimana gambar 3.3.



Pemanfaatan ruang di Jawa Barat sudah sesuai rencana tata ruang. Hal ini ditandai dengan Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Kewenangan Provinsi yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Tahun 2024 sudah tercapai sesuai harapan yaitu sebesar 100% dari target sebesar 59,80% dan terealisasi 59,80%.

Pemanfaatan Ruang Wilayah Kewenangan Provinsi yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang merupakan indikator baru di tahun 2024 maka dari capaian tahun 2024 sebesar 100%. Ini merupakan indikator yang baru sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah atau Renstra Dinas BMPR Tahun 2024 - 2026, persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Kewenangan Provinsi yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang masih memerlukan akselerasi

dengan realisasi sebesar 59,80% dari target 95.30% sehingga capaian kinerja sebesar 62,75%.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional, Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Kewenangan Provinsi yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang tidak dapat dibandingkan karena Provinsi Jawa Barat yang memakai indikator tersebut.

Faktor – faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Kewenangan Provinsi Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang yaitu meningkatnya kualitas pelayanan rekomendasi pemanfaatan ruang, RTRW Kab/Kota sesuai dengan RTRW Provinsi dan terkendalinya pemanfaatan ruang. Upaya Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Kewenangan Provinsi yang sesuai dengan rencana tata ruang antara lain Tersinkronisasi RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/ Kota (1 Dokumen yang berisi pembahasan RTRW Kabupaten/ Kota dengan rincian RTRW Kota Banjar dan RTRW Kota Tasik dibahas dalam Rapat Pleno FPR Jabar dan RTRW Kab. Bekasi dan RTRW Kab. Karawang dibahas dalam Rapat Pokja Perencanaan Tata Ruang FPR Jabar), terinformasi Tata Ruang (ITR) dan KKPR (1 Dokumen yang berisi 50 Informasi Tata Ruang), tersusunnya hasil kajian pengaturan penataan ruang (1 Kajian Petunjuk Operasional RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042) dan pengendalian pemanfaatan ruang (1 Dokumen berisi: - DAS Citarum Tengah (berupa penyusunan rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang), Terlayani sesuai Standar tercapai 100% atau dengan disusunnya 1 dokumen Petunjuk Operasional RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, kegiatan Bimbingan Teknis, 1 dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Jangka Menengah dengan modul penyusunan tahun 2023, 1 dokumen hasil analisis ruang untuk KKPR (1 PKKPR Daerah Irigasi Sadawarna, 2 Informasi Tata Ruang, dan 50 hasil analisis kesesuaian ruang untuk rapat dokumen lingkungan), serta pengembangan 1 sistem informasi penataan ruang “WARGI JABAR 3.0”. (2) Persentase RTRW Kabupaten/ Kota yang Sinkron dengan RTRW Provinsi tercapai 100% atau dengan telah ditetapkan 16 (enam belas) RTRW Kabupaten/ Kota dan 11 (sebelas) Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/ Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah terintegrasi sistem *online single submission* (OSS). (3) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti tercapai 100% atau telah dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang pada tahun 2024 di wilayah/ kawasan DAS Citarum Tengah (berupa penyusunan rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang), DAS Citarum Hilir (berupa pendataan perizinan dan kondisi lapangan kegiatan pemanfaatan ruang), DAS Cilamaya (berupa kajian pengendalian pemanfaatan ruang) dan KSP Kawasan Bandung Utara (Pemantauan Kegiatan Pemanfaatan ruang di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung).



Upaya perbaikan tahun 2025 yang akan dilakukan yaitu Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, fasilitasi percepatan penyusunan dan penetapan RTR kabkota, evaluasi RTRW Provinsi Jawa Barat dan pengetatan pemberian informasi tata ruang untuk perizinan.

Program yang mendukung pencapaian terwujudnya tata ruang wilayah provinsi jawa barat yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing yaitu program penyelenggaraan penataan ruang. Adapun efisiensi dari indikator kinerja utama (IKU) di atas mencapai 3,58% atau setara Rp. 200.077.692 dari alokasi anggaran Rp. 5.585.103.096

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berikut ini merupakan Akuntabilitas Keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Akuntabilitas Keuangan berdasarkan Sasaran Tahun 2024

No.	Sasaran	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Selisih (Rp.)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
Sasaran 1	Jalan Mantap Mendorong Pengembangan Wilayah	151.329.884.683	148.957.603.769	2.372.280.914	98,43	-
Sasaran 2	Meningkatnya kemantapan jalan Provinsi	746.637.597.463	725.621.808.622	21.015.788.841	97,19	-
Sasaran 3	Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang	5.585.103.096	5.385.025.404	200.077.692	96,42	3,58
TOTAL		903.552.585.242	879.964.437.795	23.588.147.447	97,76	3,58

3.3 REALISASI KEUANGAN

Kinerja yang dihasilkan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat selama tahun 2024 didukung oleh pelaksanaan berbagai program baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing sasaran berjalan dengan baik. Dukungan anggaran program tahun 2024 yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp. 1.072.906.213.842 dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 1.042.718.084.942,- atau sebesar 97,19 % dari pagu yang telah dianggarkan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran 2 (dua) yaitu Meningkatnya kemantapan jalan Provinsi, yaitu sebesar 97,19%. Penyerapan anggaran terendah terjadi pada sasaran 3 (tiga), yaitu Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang sebesar 96,42%.

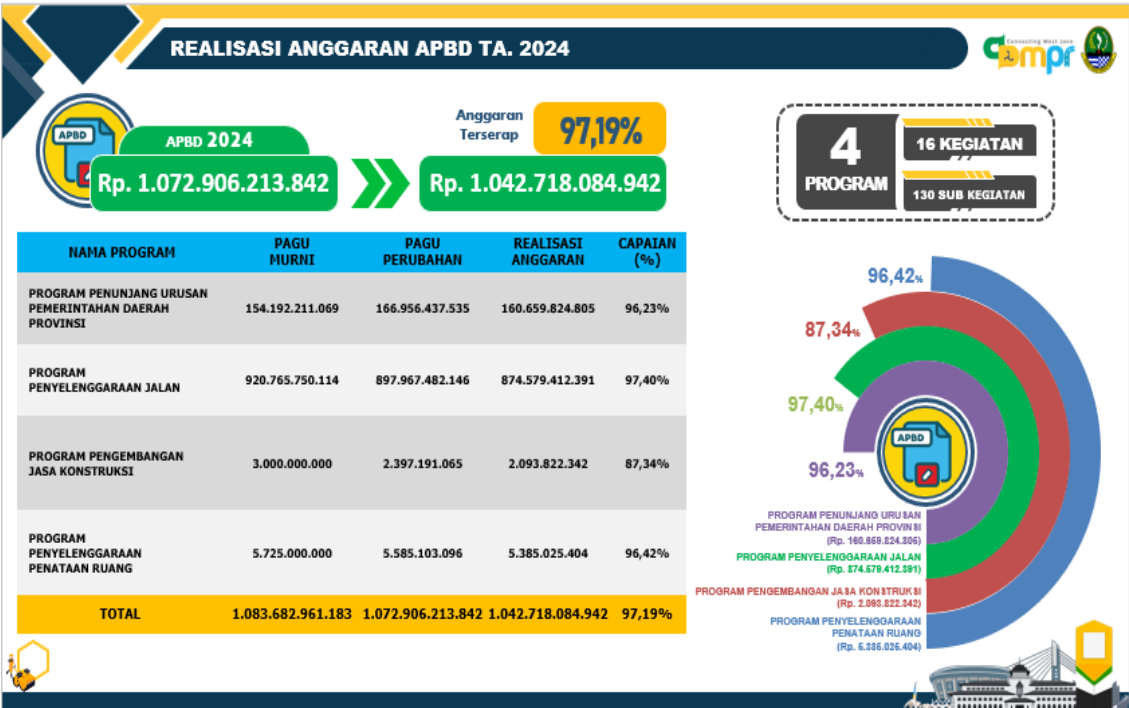
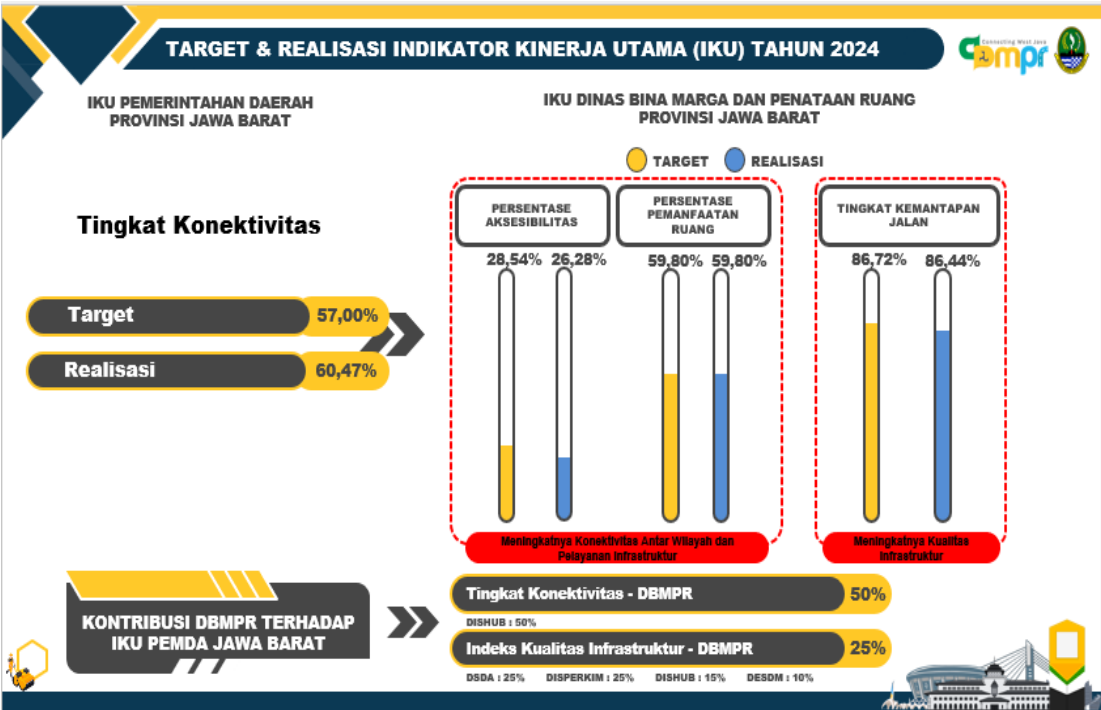
3.4 ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari semua sasaran capaian kinerjanya sudah melebihi target, dengan tingkat efisiensi yaitu :

1. Jalan Mantap Mendorong Pengembangan Wilayah, melalui indikator kinerja yaitu Aksesibilitas menuju kawasan potensial pusat-pusat kegiatan. Efisiensi anggaran sebesar 1,57% atau setara Rp. 2.372.280.914 dari alokasi anggaran Rp.151.329.884.683.
2. Meningkatnya kemantapan jalan Provinsi di Jawa Barat, melalui indikator kinerja yaitu persentase tingkat Kemantapan Jalan Provinsi Capaian kinerja tingkat kemantapan jalan provinsi Tahun 2024. Adapun efisiensi dari indikator kinerja utama (IKU) di atas mencapai 3,58% atau setara Rp. 200.077.692 dari alokasi anggaran Rp. 5.585.103.096



Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah



Dan berikut kami sampaikan secara lebih rinci capaian program dan kegiatan (data capkin) :

Tabel 3.4
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No		Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bina Marga dan Penataan Ruang					Total						1.072.096.213.842	1.042.718.084.942			
1.03.0	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai RB General Perangkat Daerah	Persen	62,00	62,00	166.956.437.535	160.659.824.805	Tidak ada permasalahan yang berarti sehingga pekerjaan selesai tepat waktu		
	1.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	1.835.008.160	1.685.020.054,00			
		1				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	810.357.144	740.522.499,00			
		2				2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	3	114.328.479	96.479.259,00			



No			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
		7					3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	19	19	910.322.537	848.018.296			
	1.02						2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	Persen	100	100	97.011.239.820	95.015.710.758			
		1					1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Orang	512	512	96.652.214.854	94.688.101.038			
		3					2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	12	12	58.122.966	57.084.255			
		4					3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan	12	12	277.221.250	247.182.715			
		5					4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	4	17.200.750	17.200.750			
		8					5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	1	6.480.000	6.142.000			



No			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.03						3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang dimanfaatkan	Persen	100	100	1.001.072.610	884.647.917			
		4					1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD = 1 Laporan	Laporan	4	4	81.249.954	73.289.750			
							2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD terlayani jasa pengamanan	Laporan	1	1	570.408.719	538.270.958			
							3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (UPTD I)	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	12	12	133.605.000	107.065.000,			
							4	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (UPTD II)	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	12	12	105.141.279	66.467.800			



No			Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.06							5	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (UPTD IV)	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	12	12	27.161.053	18.457.400			
							6	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (UPTD V)	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	12	12	83.506.605	81.097.0090			
						4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang dimanfaatkan	Persen	100	100	9.726.806.420	8.795.244.893			
		4					1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	1.028.640.840	907.488.750,			
		8					2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terlayani	Orang	5900	5900	388.900.000	344.691.879			
		9					3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	2.918.193.759	2.651.976.895			
		9					5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Labkons)	Jumlah Waktu Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	138.273.000	136.993.750			



No			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4					6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD I)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	154.392.841	146.589.500			
		9					7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD I)	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	200.230.154	190.055.607,			
		4					8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor di UPTD II	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	199.049.493	188.092.900,			
		9					9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di UPTD II	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	274.235.400	183.459.400,			
		4					10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor di UPTD III	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	83.246.000	46.795.000,			
		9					11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di UPTD III	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	222.260.596	180.357.971,			
		4					12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor di UPTD IV	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	123.821.000	121.789.778,			
		9					13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di UPTD IV	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	185.981.400	174.262.000,			
		4					14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor di UPTD V	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	101.195.690	99.807.300,			



No			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
		9					15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di UPTD V	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	197.659.264	185.050.809,			
		4					16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor di UPTD VI	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	102.567.800	94.476.400,			
		9					17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di UPTD VI	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	168.545.325	147.756.983,			
							18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pusat)	Persentase Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil pengadaan (Pusat)	Paket	4	4	122.147.898	117.698.220,			
							19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (uptd i)	Persentase Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil pengadaan (uptd i)	Paket	4	4	564.802.775	559.130.000,			
							20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD III)	Persentase Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil pengadaan (UPTD III)	Paket	12	12	366.802.160	313.189.517,			
							21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (uptd iv)	Persentase Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil pengadaan (uptd iv)	Paket	4	4	385.945.800	366.310.000,			



No			Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
							2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (uptd vi)	Paket	4	4	911.653.104	848.015.000,			
							2	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Labkon)	Paket	12	12	475.694.392	472.230.560,			
							2	4	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Harbang)	Sistem	1	1	412.567.729	319.026.674,			
1.07							5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	19.446.431.666	18.118.004.568			
	6							1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Sekre)	unit	31	31	12.525.217.931	11.551.360.945			
								2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	31	31	2.416.835.420	2.225.144.000,			
								3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD III)	unit	1	1	200.000.000	199.099.245			
	9							4	Pengadaan Gedung Kantor atau	unit	1	1	1.061.556.500	1.056.523.988			



No			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Bangunan Lainnya (UPTD IV)								
1.08								5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Labkon)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	50	50	1.267.759.726	1.259.919.750,		
								6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD III)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	157	157	1.678.420.159	1.552.427.620,		
								7	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Labkons)	Jumlah gedung kantor yang di bangun	unit	1	1	296.641.930	273.529.020		
								6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik, Jasa keamanan, dan Jasa kebersihan, pelayanan administrasi surat menyurat	Persen	100	100	24.487.069.455,00	23.201.524.357		
		2						1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	1.554.100.000	1.090.556.210		
		4						2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	12	6.422.934.842	6.307.265.565		



No			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2						3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Labkons)	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	83.518.286	82.739.143		
		4						4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Labkons)	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	12	2.343.884.398	2.337.776.563		
								5	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Labkons)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	310.418.500	309.673.735		
		2						6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD I)	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	428.893.287	381.664.485		
		4						7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD I)	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	12	2.079.203.470	2.011.976.758		
		2						8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di UPTD II	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	254.830.090	181.760.678,		
		4						9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di UPTD II	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	12	1.844.774.386	1.793.167.004		



No			Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2						10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di UPTD III	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	295.280.804	267.218.877		
		4						11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di UPTD III	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	12	2.180.486.871	2.069.781.914		
		2						12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di UPTD IV	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	174.450.798	128.953.361		
		4						13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di UPTD IV	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	12	2.135.923.214	2.074.893.123		
		2						14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di UPTD V	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	103.489.000	81.254.948		
		4						15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di UPTD V	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	2.024.419.581	1.869.068.505		
		2						16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di UPTD VI	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	269.932.059	246.576.511		
		4						17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di UPTD VI	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	12	1.980.529.869	1.967.196.977		



No			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.09						7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dimanfaatkan	Persen	100	100	13.352.899.404,00	12.929.090.758			
		2					1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	66	66	1.347.366.500	1.339.993.700			
		9					2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	Unit	7	7	2.590.904.400	2.574.781.200			
		2					3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Labkons)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	11	245.092.600	243.940.325			
		9					4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Labkons)	Jumlah gedung yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	Unit	5	5	631.425.960	625.746.877			
		2					5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD I)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	325.550.000	325.119.700			



No			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
		9						6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD I	Jumlah gedung yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	Kawasan	1	1	1.204.253.390	1.160.933.516		
		2						7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan di UPTD II	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	304.722.500	205.699.655		
		9						8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di UPTD II	Jumlah gedung yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	Kawasan	1	1	988.860.067	982.365.025		
		2						9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan di UPTD III	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	293.363.700	201.578.915		
		9						10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di UPTD III	Jumlah gedung yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	unit	8	8	1.870.646.120	1.780.056.378		
		2						11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan di UPTD IV	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	249.298.300	234.752.500		



No			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
		9					1	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di UPTD IV	Jumlah gedung yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	Unit	12	12	550.000.000	545.075.632		
		2					1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan di UPTD V	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	244.570.900	233.102.075		
		9					1	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di UPTD V	Jumlah gedung yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	Unit	12	12	599.936.000	590.909.736		
		2					1	5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan di UPTD VI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	214.541.000	200.656.550		
		9					1	6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di UPTD VI	Jumlah gedung yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	Unit	3	3	1.692.367.967	1.684.378.974		
							8		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pegawai	512	512	95.910.000	30.581.500		



No			Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanlanjut Rekomendasi DPRD			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.10															
								</							



No			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1						1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (Bidtek)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	2	2	1.882.034.227	1.675.479.162		
		3						2	Pengelolaan Leger Jalan (Bidtek)	Jumlah dokumen penyediaan data leger pengolahan jalan dan jembatan	Dokumen	2	2	1.866.857.100	1.679.761.507		
		2 2						3	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Bidtek)	(Persentase bantuan keuangan pada kab/kota yang terverifikasi (BIDTEK))	Persen	100	100	69.439.719	44.078.126		
		4						4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan (Harbang)	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisi jalan yang diselesaikan (HARBANG))	Km	2362,183	2362,183	7.915.115.796	7.874.826.725		



No			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
		23						5	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Harbang)	Km	2362,183	2362,183	20.470.647.127	19.649.016.836			
		22						6	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Labkons)	Dokumen	12	12	187.291.208	176.959.592			
		8						7	Pemeliharaan Berkala Jalan di UPTD I	Km	29,808	29,808	49.351.382.741	49.093.775.971			
								8	Rehabilitasi Jalan di UPTD I	Km	0,2145	0,2145	3.920.172.153	3.918.014.211,			
									panjang jalan yang dipertahankan kemantapannya dengan Pemeliharaan Berkala di UPTD I	Km							
									Panjang jalan yang dipertahankan kemantapannya dengan Rehabilitasi di UPTD I) Pekerjaan Marka Jalan	Km							



No			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
		11					10	Pemeliharaan Rutin Jalan di UPTD I	panjang jalan yang dipertahankan kemantapannya dengan Pemeliharaan Rutin di UPTD I	Km	395,587	395,587	49.755.499.990	49.363.588.793			
		14					12	Penggantian Jembatan di UPTD I	Jumlah Jembatan yang di ganti di UPTD I	Buah	1	1	3.335.025.386	3.308.914.128,			
							13	Rekonstruksi Jalan di UPTD I	Panjang jalan yang dilaksanakan rekonstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis di UPTD I	km	10,298	10,298	40.631.139.596	40.191.474.827			
		10					14	Pemeliharaan Berkala Jalan di UPTD II	panjang jalan yang dipertahankan kemantapannya dengan Pemeliharaan Berkala di UPTD II	Km	82,823	82,823	44.723.859.198	43.735.237.447,			
		11					15	Pemeliharaan Rutin Jalan di UPTD II	panjang jalan yang dipertahankan kemantapannya dengan Pemeliharaan Rutin di UPTD II	Km	347,73	347,73	37.429.020.226	34.084.741.258			
							16	Rehabilitasi Jalan di UPTD II	Panjang jalan yang dipertahankan kemantapannya dengan Rehabilitasi di UPTD II)	Km	0,833	0,833	3.166.452.641	3.112.776.586			



No			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
		8					17	Rekonstruksi Jalan di UPTD II	Panjang jalan yang dilaksanakan rekonstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis di UPTD II	Km	31,901	31,901	39.283.156.013	38.993.298.373			
		2					18	Rehabilitasi Jembatan di UPTD II	Jumlah Jembatan yang dipertahankan kemantapannya dengan Rehabilitasi di UPTD II)	Buah	3	3	1.582.244.692	1.497.971.129			
		10					19	Pemeliharaan Berkala Jalan di UPTD III	panjang jalan yang dipertahankan kemantapannya dengan Pemeliharaan Berkala di UPTD III	Km	15,56	15,56	23.766.589.303	23.356.795.376			
		11					20	Pemeliharaan Rutin Jalan di UPTD III	panjang jalan yang dipertahankan kemantapannya dengan Pemeliharaan Rutin di UPTD III	Km	567,027	567,027	67.038.798.787	63.086.444.945			
							21	Rehabilitasi Jalan di UPTD III	Panjang jalan yang dipertahankan kemantapannya dengan Rehabilitasi di UPTDIII	Km	1,072	1,072	4.449.153.371	4.190.545.796			



No			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
							2	2	Rehabilitasi Jembatan di UPTD III	Buah	1	1	2.983.218.999	2.942.504.340			
							2	3	Rekonstruksi Jalan di UPTD III	Km	21,316	21,316	99.228.544.274	95.999.825.974			
	1	0					2	4	Pemeliharaan Berkala Jalan di UPTD IV	Km	64,85	64,85	78.549.520.211	78.010.386.810			
	1	1					2	5	Pemeliharaan Rutin Jalan di UPTD IV	Km	401,657	401,657	39.317.875.536	37.563.382.616			
							2	6	Rehabilitasi Jalan di UPTD IV	km	4,05	4,05	10.296.692.761	10.295.243.849			
							2	7	Rekonstruksi Jalan di UPTD IV	Km	6	6	16.667.919.244	16.629.664.038			



No			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
									spesifikasi teknis di UPTD IV								
		8					28	Rekonstruksi Jalan di UPTD V	Panjang jalan yang dilaksanakan rekonstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis di UPTD V	Km	5,22	5,22	23.687.339.112	23.618.934.451			
		10					29	Pemeliharaan Berkala Jalan di UPTD V	panjang jalan yang dipertahankan kemantapannya dengan Pemeliharaan Berkala di UPTD V	Km	21	21	46.813.609.297	45.762.128.596			
							30	Rehabilitasi Jalan di UPTD V	Panjang jalan yang dipertahankan kemantapannya dengan Rehabilitasi di UPTD V)	Meter	586	586	4.384.436.777	4.254.670.244			
		11					31	Pemeliharaan Rutin Jalan di UPTD V	panjang jalan yang dipertahankan kemantapannya dengan Pemeliharaan Rutin di UPTD V	Km	286,428	286,428	30.348.740.971	29.209.629.354			
							32	Rehabilitasi Jembatan di UPTD V	Jumlah Jembatan yang dipertahankan kemantapannya dengan Rehabilitasi di UPTDV	Buah	1	1	1.123.784.373	1.098.326.887			



No			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
		8					3	Rekonstruksi Jalan di UPTD VI	Panjang jalan yang dilaksanakan rekonstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis di UPTD VI	Km	25,829	25,829	82.991.483.779	81.719.646.753			
		10					3	Pemeliharaan Berkala Jalan di UPTD VI	panjang jalan yang dipertahankan kemantapannya dengan Pemeliharaan Berkala di UPTD VI	Km	2,86	2,86	17.451.801.589	17.107.589.530,			
							3	Rehabilitasi Jalan di UPTD VI	Panjang jalan yang dipertahankan kemantapannya dengan Rehabilitasi di UPTD VI)	Km	1	1	1.357.203.316	1.352.059.274,			
		11					3	Pemeliharaan Rutin Jalan di UPTD VI	panjang jalan yang dipertahankan kemantapannya dengan Pemeliharaan Rutin di UPTD VI	Km	363,37	363,37	41.941.432.633	39.981.718.887,			
1.03.11			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang		3	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Tingkat partisipasi masyarakat jasa konstruksi Jawa Barat dalam pembangunan infrastruktu	Persen	100	100	2.397.191.065	2.093.822.342	Tidak ada permasalahan yang berarti sehingga pekerjaan selesai tepat waktu		



No			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.01						1	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Persentase sektor konstruksi yang terbina	Persen	100	100	375.400.642	331.153.883			
	4						1	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	50	50	298.452.642	265.045.383			
							2	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	Dokumen	1	1	76.948.000	66.108.500			
	1.02						2	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase tenaga ahli konstruksi yang mengikuti pelatihan	Persen	100	100	1.512.054.082	1.272.912.139			
	3						1	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	Orang	330	330	548.922.500	395.813.800,			
	5						2	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Orang	1600	1600	558.160.882	529.962.459,			



No			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
							3	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	Orang	1600	1600	58.106.500	50.934.500			
							4	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	75	75	323.667.200	282.437.880,			
							5	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Dokumen	12	12	23.197.000	13.763.500,			
								Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase layanan jasa konstruksi yang memanfaatkan sistem informasi	BUJK	50	50	509.736.341	489.756.320			
							1	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Sistem	1	1	70.994.832	67.629.667,			
							2	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	54	54	198.525.000	191.804.500,			



No			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
							3	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Dokumen	1	1	240.216.509	230.322.153,			
1.03.1 2			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang		4	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Kewenangan Provinsi Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	Persen	59,8	59,8	5.585.103.096	5.385.025.404	Tidak ada permasalahan yang berarti sehingga pekerjaan selesai tepat waktu		
	1.01						1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Kab/kota yang mendapatkan sosialisasi RTRW (TATA RUANG)	Persen	100	100	1.754.240.404	1.703.906.011			
							1	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kajian Kebijakan provinsi yang disusun selain RTRW Provinsi	Dokumen	1	1	206.594.700	193.500.500			
		4					2	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Tersosialisasi nnya penyelenggara n penataan ruang kepada berbagai pemangku kepentingan	Kegiatan	3	3	1.547.645.704	1.510.405.511			



No			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1'02						2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat	Persen	100	100	656.546.851	635.092.486			
	3						1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Tersinkronisasikannya Rancangan RTRW Kabupaten/Kota dengan RTRW Provinsi Jawa Barat melalui evaluasi dan pembahasan	Dokumen	1	1	656.546.851	635.092.486			
	1.03						3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	Persen	100	100	1.427.712.810	1.357.622.300			
							1	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	1	1	482.964.360	452.829.279			
	1						2	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	1	1	293.434.000	276.542.741			

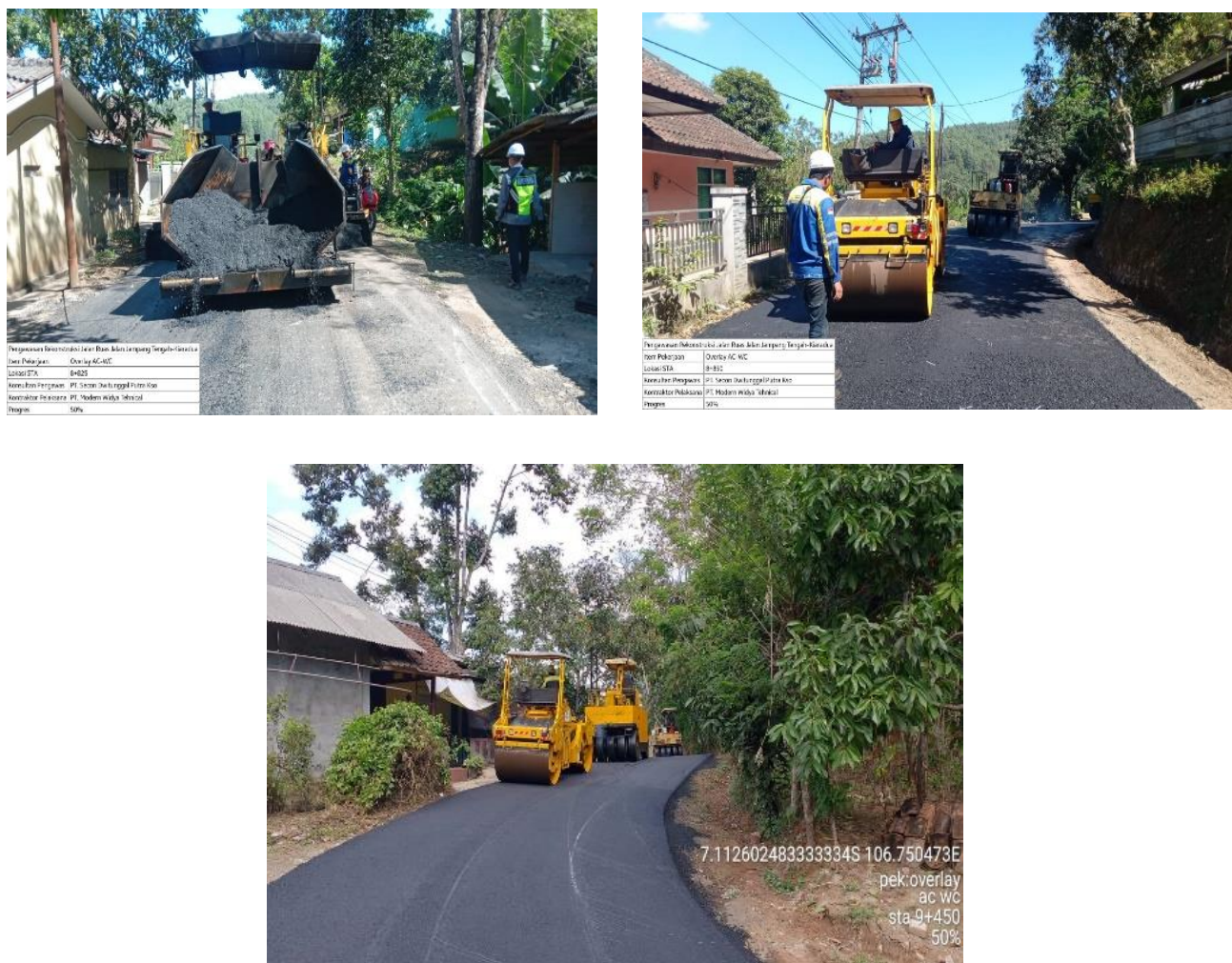


No			Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanlanjut Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2						3	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang dikelola	Sistem	1	1	651.314.450	628.250.280			
	1.04							4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase kab/kota yang mengakses web gis pemanfaatan ruang provinsi (TATA RUANG))	Persen	100	100	1.746.603.031	1.688.404.607			
		1						1	Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal	Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Dokumen	1	1	740.922.170	697.141.151			
		4						3	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	2	2	1.005.680.861	991.263.456			



1.2.1 FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN

Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Jampang Tengah - Kiaradua



Penggantian Jembatan Cimenga

BEST PRACTICE PENANGANAN JEMBATAN CIMENGA
(JEMBATAN NK = 4 DENGAN BENTANG PENDEK) - Metode Cast in Situ

PEKERJAAN PENGGANTIAN JEMBATAN CIMENGA

PROGRES Pengerjaan 95% s.d 28 OKTOBER
TARGET PHO PERTENGAHAN NOVEMBER
(Lebih Cepat 1 Bulan dari Rencana di
Pertengahan Desember)

NILAI KONTRAK
Rp. 2.985.125.863

Kondisi Awal Sebelum Pengerjaan

Kondisi Pada Saat Tahap Pengerjaan

Kondisi Terkini (28 Oktober 2024)

1.2.2 PENGHARGAAN

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2024 mendapat 5 (lima) Penghargaan diantaranya :

Tabel 2.7
Penghargaan yang Diraih Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Biro Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1	2	3	4	5	6
1	Pemenang I Kategori Pemerintah Provinsi dalam “Lomba Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Kebinamargaan untuk Penyelenggaraan Jalan”.	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat	Kementerian Pekerjaan Umum, 13 Desember 2024	
2	Penghargaan Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Terbaik.	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat	Indonesia Convention Exhibition	
3	Penghargaan Satu Data Jabar Awards dalam kategori Geospasial Perangkat Daerah	Diskominfo Provinsi Jawa Barat	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat	31 Oktober 2024 Hotel Arya Duta Bandung	
4	Humas Awards dalam sub kategori Creative Editing of The Yea	Diskominfo Provinsi Jawa Barat	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat	31 Oktober 2024 Hotel Arya Duta Bandung	
5	Humas Rising Responsiveness of The Year	Diskominfo Provinsi Jawa Barat	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat	31 Oktober 2024 Hotel Arya Duta Bandung	

BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan, tugas-tugas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu tahun anggaran 2024 telah diupayakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku. Namun, dalam perjalanannya, beberapa kelemahan dan permasalahan muncul karena dinamika global dan perkembangan eksternal yang tidak terantisipasi. Kelemahan-kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang. Tercapainya pelayanan prasarana jalan melalui pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jalan serta jembatan serta program jasa konstruksi dan penataan ruang harus dilakukan secara berkesinambungan dengan penekanan target dan sasaran untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi jalan dan jembatan yang mantap serta didukung oleh jasa konstruksi yang profesional dalam tata ruang yang nyaman dan berkelanjutan. Pencapaian kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari perbaikan manajemen penyelenggaraan jalan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat telah diupayakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku. Ini adalah Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2024, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan, dan petunjuk-NYA kepada kita semua.





DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA BARAT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah keluaran utama dari sistem akuntabilitas kinerja yang digunakan sebagai umpan balik bagi penyelenggaraan pemerintahan. LKIP merupakan tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengukuran dan pelaporan dengan membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu serta merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggara pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan visi dan misi organisasi.



